

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN HASIL PERIKANAN
PANGKALPINANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Desember 2023
Kepala,

Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran dan Daftar	

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**

*JL. PROFESI NOMOR 4, PANGKALPINANG 33149
TELEPON (0717) 434756, FAXIMILE (0717) 426434*

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2023

Kepala

Dedy Arief Hendriyanto. S.St,Pi,M.Si
NIP 197805252000031002

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 603.202.000 atau mencapai 310 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 194.585.000. Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp 7.340.859.767 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar 7.583.515.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 12.972.757.628 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 114.709.438. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Piutang jangka pendek sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 12.658.649.830 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 23.192.265 dan Rp 12.635.457.565.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 591.615.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 7.699.901.979 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (7.018.286.979). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 9.667.853 dan Rp. -. Sehingga Nilai Defisit LO Sebesar Rp (7.098.619.126).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 12.975.847.174 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (7.098.619.126) dikurangi dengan Koreksi yang mengurangi ekuitas ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.758.229.517. Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp 340.389.609 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 12.635.457.565.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2023***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	TA 2023		% thd Angga ran	TA 2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan <i>Penerimaan Negara Bukan Pajak</i>	B.1	194.585.000	603.202.000	310	543.445.374
Belanja <i>Belanja Pegawai</i>	B.2				
<i>Belanja Barang</i>	B.3	3.785.112.000	3.617.377.608	96	3.713.517.512
<i>Belanja Modal</i>	B.4	3.477.135.000	3.405.336.179	98	3.217.960.857
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	B.5	321.268.000	318.145.980	99	143.300.000
	B.6	-	-		
Jumlah Belanja		7.583.515.000	7.340.859.767	97	7.074.778.369

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22	3
Λ LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		-	
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-	
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang La	C.7	-	-	
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	-	
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-	
Persediaan	C.10	114,709,438	104,399,192	
Persediaan yang Belum Diregister				
Jumlah Aset Lancar		114,709,438	104,399,192	
Λ LANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-	
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Ja	C.13	-	-	
Jumlah Piutang Jangka Panjang				
Λ TETAP				
Tanah	C.14	3,232,044,788	3,232,044,788	
Peralatan dan Mesin	C.15	6,636,197,391	6,999,588,055	
Gedung dan Bangunan	C.16	9,098,990,849	9,098,990,849	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1,271,402,750	1,271,402,750	
Aset Tetap Lainnya	C.18	61,180,000	61,180,000	
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-7,755,875,386	(7,768,323,980)	
Jumlah Aset Tetap		12,543,940,392	12,894,882,462	
Λ LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-	
Aset Lain-Lain	C.22	-	-	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.23	-	-	
Jumlah Aset Lainnya				
Λ LAH ASET		12,658,649,830	12,999,281,654	
Λ AJIBAN				
Λ AJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	23,192,265	23,434,480	
Utang yang belum ditagihkan	C.26		-	
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C.27		-	
Utang Jangka Pendek lainnya			23,434,480	
Λ LAH KEWAJIBAN		23,192,265	23,434,480	
Λ ITAS				
Ekuitas	C.28	12,635,457,565	12,975,847,174	
Λ JUMLAH EKUITAS		12,635,457,565	12,975,847,174	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	591,615,000	543,005,000
JUMLAH PENDAPATAN		591,615,000	543,005,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,617,377,608	3,713,517,512
Beban Persediaan	D.3	319,782,509	412,829,002
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,087,584,304	2,189,822,372
Beban Pemeliharaan	D.5	380,238,299	377,762,879
Beban Perjalanan Dinas	D.6	615,406,606	370,553,957
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	0	-
Beban Bantuan Sosial	D.8		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	679,512,653	737,889,513
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7,699,901,979	7,802,375,235
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7,108,286,979	(7,259,370,235)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		9667853	-
Jumlah surplus/ (defisit) pelepasan aset Non lancar			-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		11,587,000	-
Jumlah beban dari Kegiatan Non Operasional Lain		1919147	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		9667853	440,374
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		7,098,619,126	7,258,929,861
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB			-
Beban Perjalanan Dinas			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			-
SURPLUS/DEFISIT LO		7,098,619,126	7,258,929,861

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG LAPORAN PE

PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Dec-23	2022
EKUITAS AWAL	E.1	12,975,847,174	13,587,792,377
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-7,098,619,126	(7,258,929,861)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN NEBUJARAN/NEJALAPAN	E.3.1	-	-
MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON	E.3.5		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		6,758,229,517	6,646,984,658
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	-340,389,609	(611,945,203)
EKUITAS AKHIR	E.5	12,635,457,565	12,975,847,174

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM

Pangkalpinang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di daerah yang terletak di Komplek Perkantoran.Kep.Bangka Belitung Jln Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149 dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilayah Kerja Belitung dan Muntok yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional pada umumnya memerukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nomor : KEP.118/BKIPM/2012 tentang Rencana Strategis BKIPM Tahun 2012-2014, Kebijakan strategis BKIPM KKP adalah:

- Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai

ketentuan peraturan perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdayaperikanan.

- SKIPM Pangkalpinang sebagai satuan kerja BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman dikonsumsi manusia. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan system jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

• **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp.

603.202.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 603.202.000 atau mencapai 310 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 194.585.000. Pendapatan Kantor SKIPM Pk.Pinang terdiri dari Pendapatan Jasa (Jasa karantina) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa

Karantina Perikanan serta Penerimaan Kembali Belanja BARang Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	194,585,000	589,870,000	303.14
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	1,745,000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	11.587.000	-

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2022

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2023

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	1,745,000	360,000	484.72
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Lalu		440,374	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	11,587,000		

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp

7.340.859.767

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.340.859.767 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.583.515.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,785,112,000	3,617,377,608	95.57
Belanja Barang	3,477,135,000	3,405,336,179	97.94
Belanja Modal	321,268,000	318,145,980	99.03
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	7,583,515,000	7,340,859,767	96.80
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	7,583,515,000	7,340,859,767	96.80

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,617,377,608	3,713,517,512	(2.59)
Belanja Barang	3,405,336,179	3,217,960,857	5.82
Belanja Modal	318,145,980	143,300,000	122.01
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7,340,859,767	7,074,778,369	3.76

*Belanja
Pegawai Rp
3.617.377.608*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.617.377.608 dan Rp 3.713.517.512. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI DESEMBER 2023	REALISASI TA 2022	NA (TUR %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,783,164,106	1,859,081,433	
Pengembalian tunjangan fungsional		-3440241	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	61,991,512	56,585,486	
Belanja Honorarium	0	0	
Belanja lembur / makan	128,292,000	111,039,000	(1
Pengembalian belanja lembur			
Khusus/Kegiatan)	1,643,929,990	1,690,251,834	
Jumlah Belanja Kotor	3,617,377,608	3,713,517,512	

*Belanja
Barang Rp
2.064.392.039*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.064.392.039 dan Rp. 2.189.822.372 .

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Nama Barang	REALISASI DESEMBER 2023	REALISASI TA 2022
Belanja Barang Operasional	1,005,663,144	933,821,278
Belanja Barang Non Operasional	85,796,000	87,378,000
Belanja Jasa	996,367,375	1,162,928,243
Belanja Pemeliharaan	377,664,299	374,177,639
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	615,406,606	370,553,957
Belanja Barang Persediaan	324,438,755	289,101,740
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,405,336,179	3,217,960,857
Pengembalian Belanja	-	-

Belanja Modal

Rp

318.145.980

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 318.145.980 dan Rp 143.307.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022
Belanja Modal Tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318145980	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0
Jumlah Belanja Kotor		
Pengembalian		
Jumlah Belanja	318,145,980	

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A 2022	R
-	0	
Belanja Modal BLU	0	
	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan
2022*

Keterangan	23-Dec	Dec-22
Uang Tunai		90,000,000
Bank BRI No.acc 006301000914302		-
Jumlah		90,000,000

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Penerimaan PNBPN langsung disetor ke dalam kas negara tanpa melalui Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		
Jumlah		

Piutang PNBP Rp 0

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

Uraian	2022	2021
Piutang PNBP	-	
Piutang Lainnya	-	
Jumlah	-	

Bagian Lancar **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
TP/TGR

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0- dan Rp0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2023	
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang

Lancar

Rp 0.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Internet	-	
Pembayaran Listrik	-	
Pembayaran Telpon dan Fax	-	
Pembayaran pengiriman Dokumen	-	
Jumlah	-	

*Pendapatan
yang Masih*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Harus
Diterima Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2023 dan 2022*

Jenis	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	
Jumlah	

*Persediaan Rp
114.709.438*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 114.709.438 dan Rp. 104.399.192 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	31/12/2023
Barang Konsumsi	114,709,438
Barang untuk Pemeliharaan	
Suku Cadang	
Bahan Baku	
Jumlah	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp.0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang me

ngakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
1			-
2			-
3			-
6			-
Jumlah			-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0 . Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp

3.232.044.788,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.232.044.788 dan Rp 3.232.044.788 ,- .

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3,232,044,788
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2023	3,232,044,788

Peralatan dan

Mesin

Rp

6.636.197.391

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 6.636.197.391,- dan Rp. 6.999.588.055. Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	6,636,197,391
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6,636,197,391

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan*

Rp

9.098.990.849

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 9.098.990.849. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada gedung dan bangunan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des		9098990849
Mutasi tambah:		-
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan		0
Perjalanan Dinas Pembangunan Gedung dan Bangunan		0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		0
Mutasi kurang:		-
Saldo per 31 Desember 2023		9098990849
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		
Nilai Buku per 31 Desember 2023		9,098,990,849

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi*

Rp1.271.402.7

50

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp 1.271.402.750 Mutasi transaksi terhadap Jalan,

Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	1,271,402,750
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 30 September 2021	1,271,402,750

Aset Tetap

Lainnya

Rp61.180.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 61.180.000 dan Rp 61.180.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	61,180,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	61,180,000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
7.755.875.386*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 7.755.875.386 dan Rp 7.768.323.980. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2023

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain **C.22 Aset Lain-Lain**
Rp 0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp
0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 23.192.265

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp 23.192.265. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik sebesar Rp 15.978.385 tagihan telepon sebesar Rp 63.000, tagihan Surat dinas Pos sebesar Rp 1.060.900 dan Tagihan Internet sebesar Rp 6.089.980.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada

tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	TH 2023	TH 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

12.635.457.56

5

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 12.635.457.565 dan Rp. 12.975.847.174. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp.

603.202.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 543.445.374 dan Rp. 603.202.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan
2023*

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	589870000	542,645,000	62
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Tahun Lalu		440,374	
Pendapatan jasa Karantina Perikanan	1745000	360,000	5
Jumlah	603202000	543,445,374	586

Beban

Pegawai Rp

3.617.377.608

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.713.517.512 dan Rp 3.617.377.608 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal..

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2022
Beban Gaji	1270412218	1,293,124,263
Beban Tunjangan-tunjangan	1973558390	2,083,992,249
Beban Uang makan	245115000	225,362,000
Beban Uang Lembur	128292000	111,039,000
Jumlah	3617377608	3,713,517,512

*Beban
Persediaan Rp
319.782.509*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 412.829.002 dan Rp. 319.782.509. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2022	TH 2021
Beban Persediaan Konsumsi	319375823	277,522,418	184,5
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			3,7
Beban persediaan bahan cadang			94,5
Beban Persediaan Lainnya			
Beban persediaan bahan baku	406686	135,306,584	245,3

*Beban Barang
dan Jasa Rp.
2.087.584.304*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.182.733.272 dan Rp 2.064.392.039. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2023

Beban Keperluan Perkantoran	713194157	5
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	114048000	1
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7397567	
Beban Honor Operasional Satker	118008000	1
Beban Barang Operasional Lainnya	52092400	
Beban Barang operasional - Penanganan Pandemi COVID 19		1
Beban Bahan	41136000	
Beban Honor Output Kegiatan	8160000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	36500000	
Beban Langganan Listrik	217163372	1
Beban Langganan Telpon	584808	
Beban Langganan Air		
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya		
Beban sewa	39750000	
Beban Jasa Profesi		
Beban Jasa Lainnya	739550000	8
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19		
Beban Barabg Operasional Lainnya		
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		
Jumlah	2087584304	2,1

*Beban
Pemeliharaan
Rp
380.048.299*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 380.048.299 dan Rp. 377.762.879,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209380849	186,452,840
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168283450	187,724,799
Beban bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)		0
Beban pemeliharaan Jaringan		0
Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	2145000	1,683,000
Beban Persediaan suku cadang	239000	1,902,240
Jumlah	380048299	377,762,879

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
615.406.606*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 615.406.606 dan Rp 370.553.957. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	504137814	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38010000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73258792	
Jumlah	615406606	

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
Beban Persediaan pita, cukai, materai dan legas	
Jumlah	

*Beban
Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	TH 2021
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		0	0
Jumlah		0	0

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp

679.512.653

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 365.404.855 dan Rp 737.889.513 . Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-22	31-Dec-21
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	388,451,152	549,213,152
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	193,967,715	180,053,715
Beban penyusutan Jalan dan Jembatan	82,635,375	82,635,375
Beban Penyusutan Irigasi	11,966,486	11,966,486
Beban Penyusutan Jaringan	2,491,925	2,491,925
Beban Penyusutan Aset tetap yg tidak digunakan pemerintah		3,073,152
Jumlah Penyusutan	679,512,653	826,363,710
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-
Beban Transfer	-	-
Beban lain-lain	-	-
Amortisasi	679,512,653	826,363,710

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-21	TH 2021
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2022
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	
Beban Persediaan Rusak/Usang *)	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	
Pendapatan PNBPN	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	
Beban Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12.975.847.174

4

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 12.975.847.174

Defisit LO

*Rp
(7.098.619.126)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (7.098.619.126) dan Rp (7.258.929.861). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam

pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi nilai persediaan	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non Revaluasi Rp 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 dan (Rp.3.736.854) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi aset tetap	-
Tanah	(3,736,854)
Gedung dan Bangunan	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi

atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.758.229.517 dan Rp 6.649.984.658. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rp

6.758.229.517

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp sedangkan DKEL sebesar Rp.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	
1	sertifikat kesehatan HC (Kode D)	Sekretariat BKIPM	-
2	sertifikat kesehatan HC (KI-D12)	Sekretariat BKIPM	-
3	sertifikat kesehatan HC (KI-D1)	Sekretariat BKIPM	
	Jumlah		

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0. dari total Rp0,- .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Kabupaten Belit	Tanah	
2	erintah Provinsi Bangka Bel	Tanah	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp
12.635.457.56
5

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 12.635.457.565 dan Rp 12.975.847.174.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 terdapat beberapa pengungkapan yaitu;

- a. Terdapat Revisi DIPA selama Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 kali
- b. Realisasi Anggaran Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebesar 7.583.515.000
- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2023 senilai Rp 603.202.000.
- d. Terdapat transfer masuk berupa Peralatan PCR dari BKIPM Semarang senilai Rp 12.283.750,00.
- e. Terdapat tanah yang belum di Sertifikat Hak Milik seluas 750 m² di Kabupaten Belitung, yang diperuntukkan untuk Wilker.
- f. Terdapat Penghapusan Peralatan dan Mesin, yang senilai Rp 881.489.644,- yang sudah dilakukan proses lelang.
- g. Terdapat transfer masuk berupa Thermal Cycler senilai Rp 12.343.000
- h. Terdapat Utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik sebesar Rp 15.978.385 tagihan telepon sebesar Rp 63.000, tagihan Surat dinas Pos sebesar Rp 1.060.900 dan Tagihan Internet sebesar Rp 6.089.980.

